

ACEH DAN TANTANGAN KEMISKINAN: MENELAAH PERAN PDRB DAN IPM

ACEH AND THE CHALLENGE OF POVERTY EXAMINING THE ROLE OF GRDP AND HDI¹

Dara Angreka Soufyan, Rimal Mahdani², Donni Rozika³, Didi Muhyiddin⁴,
Mardiana⁵, Cut Widy Aulia Putri⁶
Email: rimalmahdani@utu.ac.id

ABSTRACT

Poverty in Aceh Province is a complex problem that requires serious attention. This study aims to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) and Human Development Index (HDI) on the poverty rate in Aceh. Using secondary data from the Central Bureau of Statistics (BPS) from 2019 to 2023, this study applies the panel data regression method to understand the relationship between GRDP, HDI, and poverty. The analysis results show that GRDP positively influences poverty, which is caused by economic inequality in income distribution, while HDI has a significant negative influence on poverty. Development policy in Aceh should not only focus on economic growth but also on equalizing income distribution, as well as increasing investment in the education and health sectors to improve the quality of life of the people. A multidimensional approach that integrates economic growth and human development is needed to address poverty effectively.

Keywords: Poverty, GRDP, HDI, Aceh.

ABSTRAK

Kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan masalah yang kompleks dan penting untuk ditangani secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat kemiskinan di Aceh. Menggunakan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019 hingga 2023, penelitian ini menerapkan metode regresi data panel untuk memahami hubungan antara PDRB, IPM, dan kemiskinan pada 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Hasil analisis menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dalam distribusi pendapatan, sementara IPM memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kemiskinan. Penelitian menyarankan agar kebijakan pembangunan di Aceh

¹Diterima 5 Mei 2025. Direvisi 23 Mei 2025

^{2,6}Universitas Teuku Umar

³Badan Pengelolaan Keuangan Aceh

⁴Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh

⁵Dinas Sosial Aceh

tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan investasi dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pendekatan multidimensi yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia sangat diperlukan untuk mengatasi kemiskinan secara efektif.

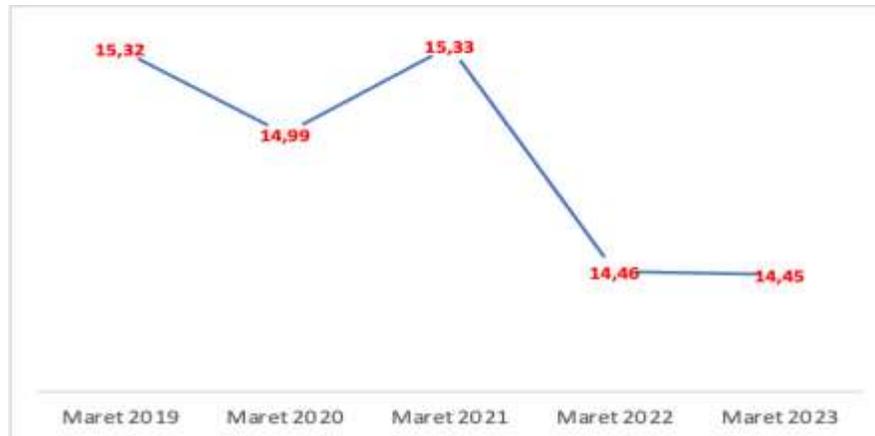
Kata Kunci: Aceh, IPM, Kemiskinan, PDRB.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Provinsi Aceh merupakan isu yang kompleks dan memerlukan perhatian serius. Pada tahun 2019 hingga Maret 2023 (Grafik 1), persentase penduduk miskin di Aceh menunjukkan fluktuasi. Setelah naik menjadi 15,33% akibat

dampak pandemi COVID-19, angka kemiskinan kembali menunjukkan tren penurunan, mencapai 14,45% pada Maret 2023 (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2023). Hal ini mencerminkan adanya tantangan yang dihadapi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Gambar 1. Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Aceh, Maret 2019 - Maret 2023



Sumber: BPS Provinsi Aceh Tahun 2023

Mempertimbangkan studi-studi terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Arifin & Hendriyani, 2022; Fahriska, 2020; Fawad,

2023; Lismana & Sumarsono, 2022; Mantsani et al., 2020; Muhsa & Lydia Rosintan, 2023; Sari & Zulfan, 2021; Shinta Aminda et al., 2024; Sinaga, 2020; Wintara & Masbar, 2021). Sebagai contoh penelitian oleh Sari dan Zulfan (2021) menunjukkan bahwa PDRB dan IPM berpengaruh signifikan terhadap tingkat

kemiskinan di Aceh. PDRB yang besar berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan (Souisa, 2024) dan tingginya IPM mengindikasikan masyarakat yang lebih terdidik dan sehat sehingga cenderung memiliki peluang ekonomi yang lebih baik (Fahraka, 2020).

Urgensi penelitian ini terletak pada pemahaman yang lebih baik mengenai hubungan antara PDRB, IPM, dan tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Dengan memahami interaksi antara ketiga variabel ini, pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi kemiskinan. Penelitian oleh (Hanifah & Sartiyah, 2023; Mantsani et al., 2020) menegaskan bahwa analisis hubungan antara PDRB, IPM, dan kemiskinan sangat penting untuk merancang strategi pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Aceh secara keseluruhan. Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kemiskinan di berbagai wilayah, termasuk di Indonesia. Namun, masih terdapat kesenjangan dalam kajian yang secara khusus menyoroti Provinsi Aceh sebagai objek penelitian. Beberapa penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Fahraka (2020) serta Arifin & Hendriyani (2022), telah menunjukkan bahwa PDRB dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Namun, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menggunakan pendekatan statistik sederhana atau terbatas pada metode regresi linier tanpa mempertimbangkan

struktur data panel, yang dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dinamika antarwaktu dan antarwilayah di Aceh. Selain itu, *evidence gap* yang terjadi pada hasil uji PDRB dan IPM terhadap kemiskinan menunjukkan adanya kontradiksi. Adapun hasil penelitian Arifin & Hendriyani (2022), Lismana & Sumarsono (2022) tidak konsisten dengan uji yang telah dilakukan oleh (Hanifah & Sartiyah, 2023; Sari & Zulfan, 2021). Dengan demikian, diperlukan penelitian lebih lanjut dengan replikasi data dan pendekatan baru yang akan memperkuat validitas temuan.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh fakta bahwa Aceh memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang unik dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Sebagai daerah yang pernah mengalami konflik berkepanjangan serta mendapatkan alokasi Dana Otonomi Khusus, analisis yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami efektivitas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia dalam mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan regresi data panel yang memungkinkan analisis lebih akurat terhadap pengaruh PDRB dan IPM terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh selama periode tertentu. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih komprehensif terkait pengambilan keputusan pengentasan kemiskinan melalui PDRB dan IPM.

1. LITERATUR REVIEW

Teori kemiskinan menjelaskan berbagai dimensi dan penyebab kemiskinan yang dihadapi oleh individu dan kelompok dalam masyarakat. Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu atau kelompok tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti pangan, sandang, dan papan (Souisa, 2024). Dalam konteks ini, kemiskinan tidak hanya dilihat dari segi ekonomi, tetapi juga dari perspektif sosial dan politik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar berkontribusi signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Ferdi, 2022; Leonita & Sari, 2019a).

Lebih lanjut, teori kemiskinan juga mencakup konsep "kemiskinan multidimensi," yang mengakui bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Dalam konteks ini, IPM dapat berfungsi sebagai indikator yang menggambarkan sejauh mana suatu wilayah telah menggunakan sumber daya penduduknya untuk meningkatkan kualitas hidup (Souisa, 2024). Penelitian oleh Harlan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan dan pengangguran juga berkontribusi terhadap kemiskinan, menekankan pentingnya pendekatan yang holistik dalam memahami dan mengatasi kemiskinan (Harlan, 2023).

Dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemiskinan, salah satu solusi yang sering dibahas adalah melalui teori pertumbuhan

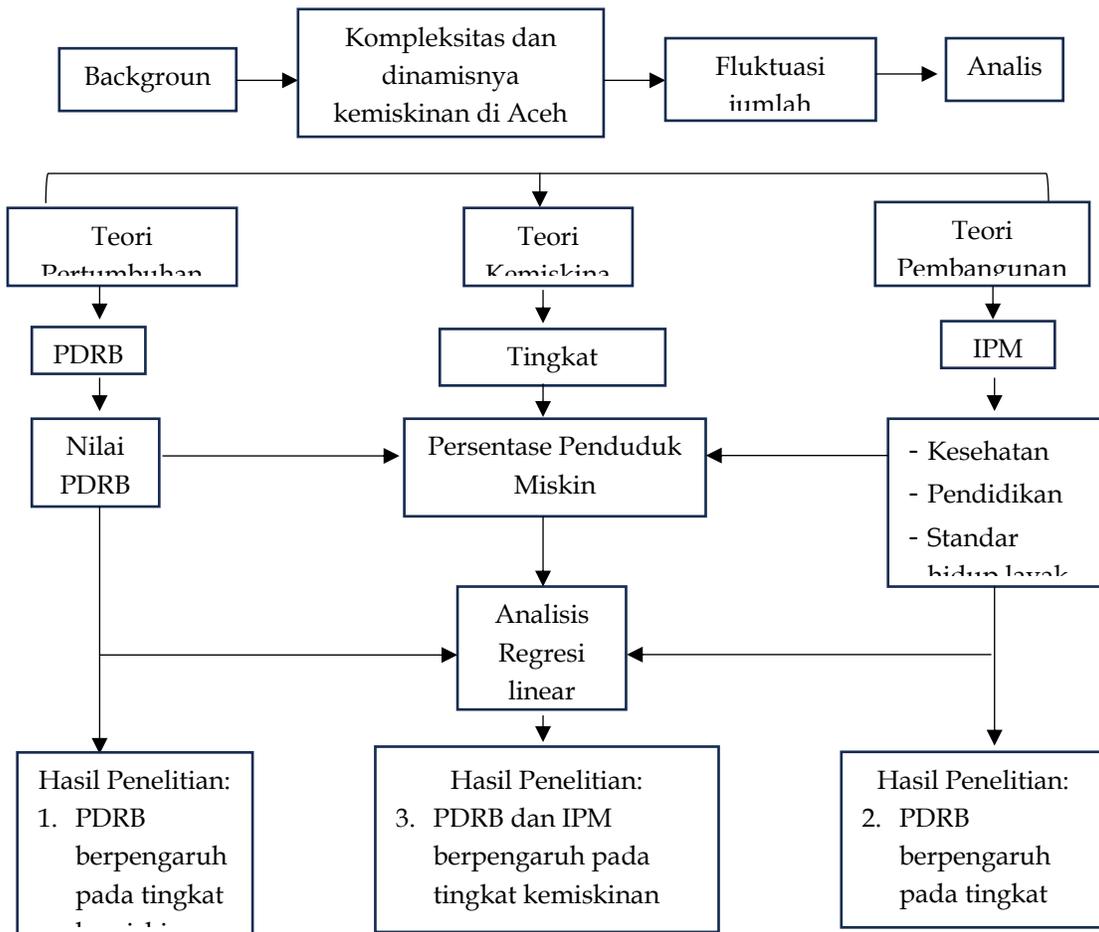
ekonomi, yang mengusulkan berbagai cara untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan (Efendi et al., 2024). Teori pertumbuhan ekonomi berfokus pada bagaimana suatu negara atau daerah dapat meningkatkan output dan pendapatan per kapita melalui berbagai faktor, termasuk investasi, tenaga kerja, dan teknologi. Model pertumbuhan Harrod-Domar, misalnya, menekankan hubungan antara investasi dan pertumbuhan ekonomi, di mana peningkatan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Penelitian oleh Aminda et al. (2024), menunjukkan bahwa investasi yang baik dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Teori pertumbuhan ekonomi juga mencakup konsep "*trickle-down effect*," di mana pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat menguntungkan semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi miskin. Namun, kritik terhadap teori ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata dan sering kali menguntungkan kelompok tertentu saja (Nurhafizah & Mafruhah, 2021). Oleh karena itu, penting untuk menggabungkan teori pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan yang berfokus pada pemerataan dan pengentasan kemiskinan, agar manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Sementara itu, untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, teori pembangunan manusia menawarkan pendekatan yang lebih holistik, dengan menekankan

pentingnya peningkatan kualitas hidup individu melalui pendidikan dan kesehatan.

Teori pembangunan manusia menekankan pentingnya meningkatkan kualitas hidup individu melalui pendidikan, kesehatan, dan partisipasi dalam proses pembangunan. IPM sebagai indikator pembangunan manusia mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak (Souisa, 2024). Penelitian (Fahrika, 2020) menunjukkan bahwa peningkatan IPM

berkontribusi pada pengurangan tingkat kemiskinan, sehingga menegaskan pentingnya investasi dalam pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Teori ini juga mengakui bahwa pembangunan manusia tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dengan penciptaan kesempatan bagi individu untuk mengembangkan potensi mereka (Azhar Kumara & Arif, 2023).

Gambar 2. Kerangka Pemikiran Operasional



Dalam konteks ini, pembangunan manusia harus menjadi fokus utama dalam kebijakan pembangunan, agar pertumbuhan ekonomi yang dicapai dapat berkelanjutan dan inklusif. Penelitian oleh (Prawitrisari et al., 2022) menunjukkan bahwa hubungan antara PDRB dan kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor pembangunan manusia, yang menunjukkan bahwa upaya untuk meningkatkan IPM dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan.

Pemahaman tentang kemiskinan memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan politik. Teori kemiskinan, teori pertumbuhan ekonomi, dan teori pembangunan manusia memberikan perspektif yang saling melengkapi dalam upaya mengatasi kemiskinan. Sementara pertumbuhan ekonomi dapat mendorong peningkatan pendapatan, peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan dan kesehatan juga penting untuk memastikan manfaat pertumbuhan dapat dirasakan oleh masyarakat Aceh. Seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan teori-teori ini sangat diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi data panel, yang menggabungkan data *cross-section* (lintas wilayah) dan *time series* (runtun waktu). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang

diperoleh dari berbagai sumber resmi dan terpercaya. Data sekunder dipilih karena memiliki cakupan yang luas serta tersedia dalam bentuk terstruktur yang memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antara variabel yang diteliti.

Sumber utama data dalam penelitian ini adalah BPS, yang menyediakan data mengenai tingkat kemiskinan, PDRB dan IPM untuk 18 kabupaten dan 5 (lima) kota di Provinsi Aceh. Dalam penelitian ini, periode yang digunakan adalah tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa rentang waktu tersebut mencakup berbagai dinamika ekonomi dan sosial yang terjadi di Aceh, termasuk dampak dari kebijakan pembangunan daerah, fluktuasi ekonomi, serta perubahan dalam indeks pembangunan manusia.

Variabel dan Definisi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel utama, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan yang diukur berdasarkan persentase penduduk miskin di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Persentase ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk dengan pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan sebagaimana ditetapkan oleh BPS.

Sementara itu, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari PDRB per kapita dan IPM. PDRB per kapita mencerminkan nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk, yang mencerminkan tingkat

pertumbuhan ekonomi suatu daerah. PDRB per kapita dalam penelitian ini diukur dalam satuan juta rupiah atas dasar harga konstan, yang bertujuan untuk menghilangkan efek inflasi. Variabel independen kedua adalah IPM, yang merupakan indeks komposit yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (usia harapan hidup), pendidikan (rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah), serta standar hidup layak (daya beli per kapita). Data terkait PDRB dan IPM diperoleh dari BPS Aceh serta publikasi resmi dari Diskominsa Aceh.

Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linear menggunakan SPSS untuk menganalisis pengaruh PDRB dan IPM terhadap jumlah penduduk miskin di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Data yang digunakan adalah rata-rata PDRB, IPM dan tingkat kemiskinan selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2019 sampai dengan 2023. Penggunaan data rata-rata bertujuan untuk mengurangi fluktuasi tahunan yang bisa disebabkan oleh faktor sementara seperti kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi tertentu. Dengan metode ini, penelitian dapat mengidentifikasi pola struktural daripada variasi tahunan yang mungkin bersifat sementara. Data diperoleh dari BPS Variabel dalam model yaitu:

Variabel dependen (Y) : Tingkat kemiskinan

Variabel Independen (X1) : PDRB

Variabel Independen (X2) : IPM

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$POV_{it} = \beta_0 + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 IPM_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

POV : Jumlah Penduduk Miskin

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

i : Kabupaten/Kota

t : Tahun

$\beta_0, \beta_1, \beta_2$: Koefisien regresi

ε : Error term

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Uji Asumsi Klasik

Adapun hasil uji asumsi klasik untuk multikolinearitas, normalitas dan heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

1. Multikolinearitas: berdasarkan nilai VIF dan korelasi, tidak terdapat multikolinearitas (nilai korelasi: PDRB 0.704, IPM -0.114).
2. Normalitas: menggunakan histogram dan P-P Plot Residual tampak berdistribusi normal (rata-rata ~ 0 , Std. Dev. = 0.953, P-P plot sejajar).
3. Heteroskedastisitas: Scatterplot residual dan predicted, tidak terdapat pola yang jelas dalam scatterplot sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model ini.

Analisis Regresi

Pengaruh PDRB dan IPM menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik, dengan *Rsquare* sebesar 0.713 atau dengan kata lain 71.3% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB dan IPM, sementara sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model ini.

Uji ANOVA

Uji ANOVA menunjukkan nilai F sebesar 24.838 dengan Sig. < 0.001 (Tabel 2), yang berarti model regresi secara keseluruhan signifikan. Hal ini menegaskan bahwa PDRB dan IPM secara bersama-sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap tingkat kemiskinan.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.844 ^a	.713	.684	13857.18849	1.889

a. Predictors: (Constant), IPM, PDRB

b. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel 1. Ringkasan Model Regresi
Source: data diolah (2025)

Koefisien Regresi

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Kemiskinan = 235206.609 + 5.212 (PDRB) - 3220.323 (IPM)

- Koefisien PDRB = 5.212 (Sig. < 0.001)
Artinya, setiap kenaikan satu satuan PDRB akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 5.212 jiwa dengan asumsi faktor lain tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta menurunkan kemiskinan, tetapi mungkin karena distribusi pendapatan yang tidak merata. Temuan ini sejalan dengan kritik

terhadap teori *trickle-down effect*, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sering kali hanya menguntungkan kelompok tertentu (Nurhafizah & Mafruhah, 2021).

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	9538904682.93	2	4769452341.46	24.838	<.001 ^b
		6		8		
	Residual	3840433454.80	20	192021672.740		
		3				
	Total	13379338137.7	22			
		39				

a. *Dependent Variable:* Kemiskinan

b. *Predictors:* (Constant), IPM, PDRB

Tabel 2. Hasil Kelayakan Model
Source: data diolah (2025)

- Koefisien IPM = -3220.323
(Sig. < 0.001)

Hal ini berarti setiap peningkatan satu satuan IPM akan menurunkan kemiskinan sebesar 3220.323 jiwa dengan asumsi PDRB tetap. Koefisien ini negatif dan signifikan, yang menunjukkan bahwa peningkatan pembangunan manusia (melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak) memiliki dampak langsung dalam mengurangi angka kemiskinan. Hasil ini mendukung teori pembangunan manusia, yang menyatakan bahwa investasi dalam pendidikan dan kesehatan berkontribusi signifikan terhadap pengurangan kemiskinan (Souisa, 2024).

Pembahasan

Pengaruh PDRB terhadap Kemiskinan

Secara teoritis, pertumbuhan ekonomi yang tercermin dalam PDRB diharapkan

dapat mengurangi kemiskinan. Namun, hasil regresi dalam penelitian ini justru menunjukkan koefisien PDRB yang positif sebesar 5.212 ($p < 0.001$), yang mengindikasikan bahwa setiap kenaikan satu satuan PDRB justru meningkatkan tingkat kemiskinan. Temuan yang kontra-intuitif ini dapat dijelaskan melalui beberapa perspektif penting dalam konteks Aceh.

Pertama, struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi oleh sektor ekstraktif dan padat modal, seperti pertambangan dan industri pengolahan, cenderung menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tidak inklusif. Sejalan dengan penelitian Leonita dan Sari (2019), pertumbuhan di sektor-sektor ini sering kali tidak menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat miskin, yang umumnya bekerja di sektor informal dan pertanian subsisten. Kedua,

karakteristik historis Aceh sebagai daerah pasca-konflik dengan implementasi otonomi khusus memberikan dimensi unik pada hubungan PDRB dan kemiskinan. Meskipun dana otonomi khusus berkontribusi pada peningkatan PDRB, penelitian (Prawitrisari et al., 2022) menunjukkan bahwa tanpa mekanisme distribusi yang efektif, pertumbuhan ekonomi justru dapat memperlebar kesenjangan. Di Aceh, hal ini tercermin dari tingginya konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan, sementara daerah pedesaan yang menjadi tempat tinggal sebagian besar masyarakat miskin tetap tertinggal. Ketiga, hambatan struktural dalam perekonomian Aceh masih menjadi tantangan serius. Infrastruktur yang belum merata, akses terhadap modal

yang terbatas, serta keterampilan tenaga kerja yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar membuat masyarakat miskin sulit berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Situasi ini sejalan dengan kritik terhadap teori *trickle-down effect* yang dikemukakan oleh (Nurhafizah & Mafruhah, 2021), di mana pertumbuhan ekonomi tanpa transformasi struktural justru dapat memperburuk ketimpangan.

Fenomena ini tidak unik untuk Aceh. Beberapa provinsi lain di Indonesia dengan karakteristik serupa, seperti Papua dan Maluku, juga menunjukkan pola di mana peningkatan PDRB tidak selalu berkorelasi dengan penurunan kemiskinan. Hal ini menegaskan pentingnya memahami konteks lokal dalam merancang strategi pengentasan kemiskinan.

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	235206.609	57587.945		4.084	<.001
	PDRB	5.212	.746	.929	6.984	<.001
	IPM	-3220.323	828.142	-.517	-3.889	<.001

a. Dependent Variable: Kemiskinan

Tabel 3. Koefisien Regresi dan Signifikansi Variabel

Source: data diolah (2025)

Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi perlunya reorientasi kebijakan pembangunan di Aceh. Pertama, diperlukan kebijakan yang mendorong pertumbuhan di sektor-sektor padat karya seperti agroindustri dan UMKM, yang dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dari kelompok miskin. Kedua, penguatan program

pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan akses permodalan perlu diprioritaskan untuk memastikan masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi. Ketiga, pemerataan pembangunan infrastruktur, terutama di wilayah pedesaan, harus menjadi fokus

untuk mengurangi kesenjangan spasial dalam pembangunan ekonomi.

Pengaruh IPM terhadap Kemiskinan

Hasil regresi menunjukkan bahwa IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Hal ini konsisten dengan teori pembangunan manusia yang menekankan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Souisa, 2024; Kumara & Arif, 2023). Peningkatan IPM tidak hanya meningkatkan kualitas hidup individu, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap pengurangan angka kemiskinan, karena masyarakat yang lebih terdidik dan sehat memiliki peluang kerja yang lebih baik, serta akses ke sumber daya ekonomi yang lebih luas. Secara khusus, dimensi-dimensi dalam IPM—pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak—memiliki peran yang saling mendukung dalam mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang lebih baik membuka peluang kerja yang lebih luas, sementara peningkatan kualitas kesehatan memungkinkan individu untuk bekerja lebih produktif. Standar hidup yang layak, yang tercermin dalam daya beli yang lebih tinggi, memberikan akses yang lebih baik kepada masyarakat untuk memperoleh barang dan jasa yang mendukung kualitas hidup mereka. Oleh karena itu, investasi dalam ketiga dimensi ini sangat krusial untuk pengurangan kemiskinan di daerah-daerah yang masih tertinggal, seperti di Provinsi Aceh.

Penelitian sebelumnya oleh Muhsa dan (Muhsa & Lydia Rosintan, 2023) juga menunjukkan bahwa peningkatan IPM secara signifikan dapat mengurangi kemiskinan. Pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang memadai meningkatkan potensi individu untuk berpartisipasi dalam pasar kerja dengan lebih kompetitif. Lebih lanjut, hasil ini memperkuat argumen bahwa pembangunan manusia yang lebih inklusif, yang mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan, dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang mampu.

Namun, meskipun hubungan antara IPM dan pengurangan kemiskinan sangat kuat, tantangan besar tetap ada dalam implementasi kebijakan IPM di daerah-daerah tertentu. Misalnya, ketidakmerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan di wilayah yang lebih terpencil atau miskin seringkali menjadi hambatan besar. Masyarakat di daerah terpencil seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang dapat menghalangi mereka untuk meraih manfaat dari kebijakan pembangunan manusia.

Untuk itu, kebijakan pengentasan kemiskinan sebaiknya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus lebih menekankan pada pemerataan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Beberapa kebijakan yang dapat diusulkan untuk meningkatkan IPM, seperti program pendidikan vokasi yang dapat menjangkau daerah-daerah terpencil atau peningkatan fasilitas kesehatan di

wilayah yang kurang terlayani, akan sangat efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

Pengaruh PDRB dan IPM terhadap Kemiskinan

Secara simultan, hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB dan IPM secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Aceh. Hal ini dibuktikan dengan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,713 (Tabel 1) yang mengindikasikan bahwa 71,3% variasi dalam tingkat kemiskinan dapat dijelaskan oleh perubahan dalam PDRB dan IPM (Tabel 2). Dengan demikian, kedua variabel ini memiliki relevansi tinggi dalam menjelaskan dinamika kemiskinan di Aceh (Nurhafizah & Mafruhah, 2021). Hal ini dapat dijelaskan oleh struktur ekonomi Aceh yang masih didominasi oleh sektor ekstraktif dan padat modal, seperti pertambangan dan industri pengolahan, yang cenderung tidak menciptakan lapangan kerja luas bagi masyarakat miskin (Leonita & Sari, 2019b). Selain itu, distribusi hasil pembangunan yang tidak merata, terutama antara wilayah perkotaan dan pedesaan, turut memperlebar kesenjangan dan meningkatkan kerentanan kemiskinan, seperti juga dikemukakan oleh Prawitrisari et al., (2022). Sementara itu, IPM menunjukkan hubungan negatif yang signifikan dengan tingkat kemiskinan ($B = -3220.323$; $p < 0.001$), yang mengindikasikan bahwa peningkatan IPM berperan dalam menurunkan kemiskinan. Temuan ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang

menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Azhar Kumara & Arif, 2023; Souisa, 2024). Individu yang lebih sehat dan berpendidikan memiliki peluang kerja lebih baik dan daya saing ekonomi yang lebih tinggi oleh karena itu, peningkatan IPM sangat berkorelasi dengan pengurangan kemiskinan di berbagai daerah di Indonesia (Fahriska, 2020). Dengan demikian, hasil empiris ini menggarisbawahi bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Aceh harus melampaui pendekatan makroekonomi semata. Pertumbuhan ekonomi yang diwakili oleh PDRB perlu diarahkan agar lebih inklusif dan berpihak pada kelompok rentan. Di sisi lain, pembangunan manusia melalui peningkatan IPM terbukti lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, strategi penanggulangan kemiskinan perlu mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan pembangunan manusia secara seimbang dan saling menguatkan. Rekomendasi Kebijakan:

1. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Pendidikan dan Kesehatan

Kebijakan yang dapat memastikan pemerataan akses pendidikan dan layanan kesehatan sangat penting. Pemerintah harus mengalokasikan lebih banyak anggaran untuk pembangunan sekolah dan rumah sakit di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2. Investasi dalam Pendidikan Vokasi dan Keterampilan

Fokus pada pengembangan pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan di

daerah miskin dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang pada gilirannya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pekerjaan informal dan meningkatkan mobilitas sosial.

3. Meningkatkan Fasilitas Kesehatan di Wilayah Tertinggal

Penyediaan layanan kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih mudah ke fasilitas kesehatan akan memastikan masyarakat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, yang berdampak pada peningkatan produktivitas dan pengurangan kemiskinan.

4. Meningkatkan Kebijakan Pemerataan Ekonomi

Meskipun IPM memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan, distribusi manfaat dari pertumbuhan ekonomi tetap menjadi tantangan. Oleh karena itu, kebijakan yang mendukung pemerataan ekonomi, seperti peningkatan akses pekerjaan yang layak dan pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, harus diperkuat.

Secara keseluruhan, hasil ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan manusia yang berbasis pada IPM dalam mengurangi kemiskinan. Upaya untuk meningkatkan IPM harus diiringi dengan kebijakan yang menjamin pemerataan akses pendidikan dan kesehatan di seluruh lapisan masyarakat, khususnya di daerah-daerah miskin. Kombinasi kebijakan ini, jika diterapkan secara konsisten, akan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

C. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis regresi, dapat disimpulkan bahwa:

1. PDRB memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun, hal ini lebih disebabkan oleh ketimpangan distribusi ekonomi, yang seringkali menyebabkan manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.
2. IPM memiliki pengaruh negatif terhadap kemiskinan, yang berarti semakin tinggi IPM, semakin rendah tingkat kemiskinan. Ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak memiliki peran yang sangat penting dalam pengentasan kemiskinan.
3. Secara simultan, PDRB dan IPM memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan, namun IPM terbukti memiliki dampak yang lebih besar dalam mengurangi kemiskinan dibandingkan PDRB.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran kebijakan yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pemerataan distribusi pendapatan

Peningkatan PDRB saja tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan jika tidak disertai dengan kebijakan pemerataan ekonomi. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin. Kebijakan

yang fokus pada peningkatan akses ke lapangan pekerjaan dan pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, sangat penting.

2. Meningkatkan investasi dalam pembangunan manusia

Kebijakan pembangunan harus berfokus pada peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Program pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan untuk masyarakat miskin harus diperluas, sehingga mereka memiliki peluang lebih baik untuk memperoleh pekerjaan yang lebih layak. Selain itu, sektor kesehatan harus diperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

3. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta

Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting. Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan swasta untuk berinvestasi dalam pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka. Selain itu, sektor swasta dapat dilibatkan dalam menciptakan lapangan kerja yang inklusif dan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.

4. Pendekatan multidimensi dalam pengentasan kemiskinan

Pengentasan kemiskinan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih holistik, menggabungkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan akses, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan pembangunan berfokus pada pemerataan dan pengurangan kesenjangan sosial di setiap wilayah.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan:

1. Mengintegrasikan variabel lain yang relevan dengan kemiskinan seperti tingkat pengangguran, gini ratio, inflasi.
2. Menggunakan pendekatan panel data lanjutan. Meskipun penelitian ini telah menggunakan regresi linear, pendekatan panel data dengan metode *Fixed Effect* atau *Random Effect* direkomendasikan untuk memperhitungkan variabilitas antarwilayah dan antarwaktu secara lebih akurat. Ini akan memperkuat validitas hasil, terutama jika cakupan data diperluas hingga lebih dari lima tahun
3. Menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif (*mixed-methods*). Wawancara dengan pemangku kebijakan daerah, tokoh masyarakat, atau rumah tangga miskin dapat memperkaya interpretasi atas temuan statistik yang diperoleh.
4. Analisis subregional dan perkotaan-pedesaan yang membedakan antara wilayah perkotaan dan pedesaan atau antar subregion Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminda, R. S., Septiani, A., Sundarta, M. I., Agung, S., Kuraesin, E., Karyatun, S., & Endri, E. (2024). Analysis of the influence of poverty, human development index, and unemployment on economic growth in the regency/city of Gorontalo Province: 2012–2021 study. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(4).

- <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.3513>
- Arifin, N., & Hendriyani, Y. (2022). PDRB, IPM, DAN Kemiskinan DI Indonesia. *Finansha: Journal of Sharia Financial Management*, 3(2), 87–103. <https://doi.org/10.15575/fjsfm.v3i2.20947>
- Azhar Kumara, J., & Arif, M. (2023). Determinan Variabel-Variabel Makro Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sumatera Selatan Tahun 2017-2021. *Primanomics : Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 21(3), 90–96. <https://doi.org/10.31253/pe.v21i3.2066>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2023). *Profil Kemiskinan Aceh Tahun 2023*.
- Efendi, B., Putri, D., Rusiadi, N., & Pratiwi, D. (2024). *Teori Indeks Pembangunan Manusia* (M. Jannah, Ed.; 1st ed.). Tahta Media Group.
- Fahrika, I. (2020). Effect of Human Development Index (HDI), Unemployment, and Investment Realization toward Poverty in South Sulawesi- Indonesia . *The International Journal of Social Sciences World(TIJOSSW)* , 2(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.4080749>
- Fawad, M. (2023). The Poverty Debate. *American International Journal of Contemporary Research*, 13(1), 32–42. <https://doi.org/10.30845/aijcr.v13n1p5>
- Ferdi. (2022). Hubungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*, 3(01), 26–33. <https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i01.250>
- Hanifah, M., & Sartiyah, S. (2023). Pengaruh Dana Zakat, PDRB Perkapita Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *AGROTEKSOS*, 33(2), 506. <https://doi.org/10.29303/agroteksos.v33i2.822>
- Harlan, E. (2023). Bagaimana Konsumsi Tembakau, IPM, Ketimpangan, Pendapatan dan Pengangguran Mempengaruhi Kemiskinan di Lampung? *Tirtayasa Ekonomika*, 18(2), 22. <https://doi.org/10.35448/jte.v18i2.22007>
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019a). Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Indonesia. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi*,

- Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 1.
<https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>
- Leonita, L., & Sari, R. K. (2019b). Pengaruh PDRB, Pengangguran dan Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan di Indonesia. *ISOQUANT : Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(2), 1.
<https://doi.org/10.24269/iso.v3i2.252>
- Lismana, A. I., & Sumarsono, H. (2022). Analysis of the Effect of Population Growth, Human Development Index and Unemployment Rate on Poverty in West Java Province 2017-2020. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 20(01), 88-97.
<https://doi.org/10.22219/jep.v20i01.20286>
- Mantsani, M., Rumodar, D. A. L., Syukriah, K., & Soegiarto, S. (2020). Determinan Kemiskinan Provinsi Aceh Tahun 2017. *Seminar Nasional Official Statistics*, 2019(1), 466-477.
<https://doi.org/10.34123/semnasofstat.v2019i1.17>
- Muhsa, T. T., & Lydia Rosintan. (2023). Analisis Variabel Tingkat Kemiskinan Kota/Kabupaten Di Provinsi Kalimantan Selatan. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 3(1), 799-814.
<https://doi.org/10.25105/jet.v3i1.15594>
- Nurhafizah, & Mafruhah, A. Y. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Dependency Ratio terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2000-2019. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2), 109-117.
<https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.402>
- Prawitrisari, I. W., Indarti, D., & Wijayanto, B. (2022). Analisis Hubungan PDRB dan Kemiskinan Di Kabupaten Bantul Tahun 2004-2022. *Jurnal Dinamika Ekonomi Rakyat*, 1(2), 71-85.
<https://doi.org/10.24246/dekat.v1i2.10733>
- Sari, D. M., & Zulfan. (2021). Analysis Of Panel Data Of Poverty In Aceh Province. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(01), 40-54.
<https://doi.org/10.56196/jta.v11i01.185>
- Shinta Aminda, R., Septiani, A., Sundarta, M. I., Agung, S., Kuraesin, E., Karyatun, S., & Endri Endri, E. (2024). Analysis of the influence of poverty, human development index, and unemployment on economic growth in the regency/city of Gorontalo Province: 2012-2021 study. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(4).

<https://doi.org/10.24294/jipd.v8i4.3513>

Sinaga, M. (2020). Analysis of Effect of GRDP (Gross Regional Domestic Product) Per Capita, Inequality Distribution Income, Unemployment and HDI (Human Development Index) on Poverty. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(3), 2309–2317.
<https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1177>

Souisa, G. A. (2024). Model Two-Stage Least Square (2SLS) Untuk Menganalisis Hubungan Indeks Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan. *PARAMETER: Jurnal Matematika, Statistika Dan Terapannya*, 3(01), 12–18.
<https://doi.org/10.30598/parameter.v3i01pp12-18>

Wintara, H., & Masbar, R. (2021). Determinants of Socio Economic and Demographic Characteristics of Poverty in Aceh Province. *International Journal of Business, Economics and Social Development*, 2(2), 50–56.